

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM MERESPON KEPENTINGAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI

OLEH:

**MIKHA JUNI ADELLINA MENDROFA
15.851.0014**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/31/19

(Access From repository.uma.ac.id)

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM MERESPON KEPENTINGAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarajana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH:

**MIKHA JUNI ADELLINA MENDROFA
15.851.0014**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/31/19

(Access From repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara
Dalam Merespon Kepentingan Perempuan**

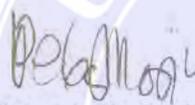
Nama : **Mikha Juni Adellina Mendrofa**

NPM : **15.851.0014**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

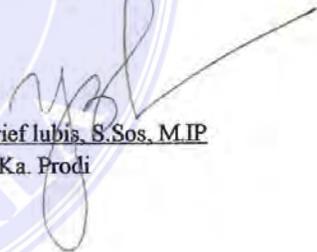
Disetujui Oleh

Komisi pembimbing


Beby Masitho Batubara, Sos. MAP
Pembimbing I


Yurial Arief Lubis, S.sos. M.IP
Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan


Yuria Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 10 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 September 2019



Mikna Juni Adellina Mendrofa
NPM : 158510014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mikha Juni Adellina Mendrofa
NPM : 15.851.0014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

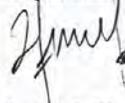
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon kepentingan Perempuan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 September 2019

Yang menyatakan



Mikha Juni Adellina Mendrofa

ABSTRAK

Isu mengenai masalah gender merupakan isu yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui kinerja anggota perempuan di DPRD provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam upaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di kekuasaan legislatif dimana masyarakat masih mengutamakan profesionalisme laki-laki sehingga perempuan seakan hanya sebagai pelengkap. Kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa dilihat pada periode ini dalam pencapaian kuliatas atau memperjuangkan hak-hak perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup baik. Faktor menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan adalah masalah anggaran dalam melaksanakan tugas masih kurang dimana dalam merespon aspirasi masyarakat seperti mengembangkan kreativitas kaum perempuan di daerah-daerah masih belum terealisasikan akan tetapi aspirasi dari masyarat di terima. Faktor lain penghambat kinerja legislatif perempuan yaitu budaya dimana pandangan masyarakat terhadap wanita yang masuk dalam ranah politik yang memiliki tanggung jawab yang banyak sehingga pandangan tersebut tidak terlalu banyak perempuan yang terlalu serius dalam berpolitik.

Kata Kunci : Kinerja, Legislatif, Gender, Politik

ABSTRAK

Issues on gender issues are issues that have long existed both in Indonesia and in other countries, in essence gender issues are issues that demand equality between men and women, this is actually the right of every citizen because both the people men and women are one and the same citizen and protected by the state constitution. The purpose of the study is to refer to things that are to be achieved in a study. The goal to be achieved is to know the performance of female members in the North Sumatra provincial DPRD and find out what factors hinder the performance of female members of the DPRD North Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative research method. Qualitative research is research on descriptive research and tends to use analysis. In an effort to fulfill the 30% quota of women's representation in legislative power where the community still prioritizes the professionalism of men and women as if it were only a complement. The performance of women legislative members in carrying out their duties and authority can be seen in this period in achieving superiority or fighting for women's rights In the DPRD of North Sumatra Province it is quite good. The factor hindering the performance of women members of North Sumatra Provincial DPRD in responding to women's interests is the problem of budgeting in carrying out tasks that are still lacking in responding to people's aspirations such as developing women's creativity in the regions but not yet realized. Another factor inhibiting women's legislative performance is the culture where the public views women who are in the political realm who have many responsibilities so that this view is not too many women who are too serious in politics.

Keywords: Performance, Legislature, Gender, Political

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “**Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan**”. Skripsi ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Medan Area.

Proses penyusunan hingga terwujudnya skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan, motivasi, perhatian, semangat dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada :

1. Orang tua saya yang tercinta, terima kasih atas doa yang tidak hentinya untuk penulis, serta dukungan baik berupa pikiran dan materi.
2. Kepada Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos. M.AP selaku dosen pembimbing 1, terima kasih telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai dosen pembimbing 2.
4. Kepada Bapak Rholand Muary S.Sos.M.Si selaku sekretaris telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi
5. Kepada Seluruh Anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara yang sudah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada kawan-kawan seperjuangan stanbuk 2015 juga saya mengucapkan banyak terima kasih telah membantu dan selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Guru-guru Sekolah Minggu GPI Shalom yang sering memberikan masukan dan mendoakan dalam menyusun skripsi sampai saat ini.
8. Kepada Para sahabatku, Christy Natalia Tambunan dan Renita Christina Rajaguguk, terima kasih buat kalian yang selalu menghibur dan memberikan motivasi dalam menyusun skripsi ini

Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, pengambilan referensi dan lain sebagainya. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan sebagai bahan evaluasi kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai panduan kedepannya.

Medan, 11 Juli 2019

Penulis

Mikha J. A.Mendrofa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. URAIAN TEORI	7
2.1.1. Teori Kinerja	7
2.1.2. Pengukuran kinerja.....	16
2.1.3. Kontruksi Sosial Perempuan dalam Ranah Politik	19
2.1.4. Legislatif	20
2.1.5. Politik Gender	21
2.1.6. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	22
2.1.7. Partisipasi Politik.....	23
2.1.8. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	27
2.1.9. Model Partisipasi Politik.....	28
2.1.10. Partisipasi Politik Perempuan	29

2.1.11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	30
2.1.12. Partai Politik.....	30
2.1.13. Peran Partai Politik Affirmative Action.....	32
1.2. Penelitian Relevan.....	33
1.3. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian.....	36
3.3. Waktu Penelitian.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Profil DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.1.1. Sejarah Singkat mengenai DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.2. Gambaran Umum Dprd Provinsi Sumatera Utara.....	44
4.2.1. Tugas DPRD.....	44
4.2.2. Fungsi DPRD.....	45
4.2.3. Hak DPRD.....	45

4.2.4. Hak Anggota DPRD	45
4.2.5. Komisi DPRD	46
4.2.6. Panitia-Panitia Tetap di DPRD.....	47
4.3. Kaukus Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	47
4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
4.4.1. Kinerja Anggota Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Merespon Kepentingan Perempuan.....	50
4.4.2. Faktor Penghambat Kinerja Anggota Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Merespon Kepentingan Perempuan.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
8.1 Kesimpulan.....	61
5.1.1. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang	61
5.1.2. Faktor Penghambat Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara dalam Merespon Kepentingan Perempuan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Piramida Partisipasi Politik.....	26
Tabel 1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	27
Tabel 2.1 kerangka pemikiran.....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1 Nama anggota legislatif DPRD Sumut 2014-2019	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Isu mengenai masalah gender merupakan isu yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dimana dinyatakan bahwa : Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan..

Undang-undang dasar republik Indonesia tidak memberikan batasan akan berpartisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka dilembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan diseluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai *the*

second human being (manusia kelas kedua) yang berada dibawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar perlengkapan yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.

Faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen, dalam hal ini di tingkat legislatif yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal ialah faktor yang berkaitan kointruksi dan tradisi yang berlaku didalam masyarakat. Faktor internal disebut juga dengan *nature* yaitu aspek sosial dan budaya, perempuan terbentuk dengan/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Juga perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga tidak selalu dapat “siap dipakai” dalam peran mengurus organisasi, sikap alam yang melekat pada perempuan yang mematahkan gairah kaum perempuan untuk terjun kedalam dunia politik. Faktor Eksternal ialah faktor yang berkaitan dengan lemahnya kebijakan-kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan. Dan bahkan sering terdengar bahwa anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dan melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga.

Banyak hak-hak perempuan selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD, sehingga banyak hal yang harus di perjuangkan dalam upaya tercapainya persamaan bagi hak perempuan seperti menghilangkan diskriminasi dalam diri perempuan, mengatasi persoalan kesehatan perempuan, pendidikan, kemiskinan, meningkatkan keterwakilan di parlemen, dan lain-lain sehingga perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus. Hal ini kurangnya pengetahuan, banyak perempuan yang

terjebak dengan penyakit keperempuanan seperti kanker rahim, kanker payudara, serta perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. oleh sebab itu perempuan harus mampu mengorganisir diri mereka sendiri dengan meningkatkan pendidikan. Perempuan yang berpendidikan akan dapat banyak manfaat dihidupnya antara lain ialah lebih cerdas dalam menghindari perdagangan manusia, lebih cerdas dalam menghadapi segala bentuk penipuan dan lebih percaya diri. Dalam memperjuangkan keadilan di bidang politik bagi perempuan, berbagai gerakan *Affirmative action* kembali dilakukan oleh para aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satunya ialah pada saat parlemen mengesahkan dua undang-undang politik yaitu UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat mengajukan calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Walaupun pada pasal ini tidak mencatumkan jumlah tetapi jelas, pada pasal 13 ayat 3 tercatum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepemimpinan partai politik disetiap tingkatan.

Seperti halnya Di DPRD Provinsi Sumatera utara keterwakilan anggota perempuan sangat sedikit, namun untuk periode 2014-2019 dapat dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada periode 2009-2014 perempuan yang berhasil duduk di parlemen hanya 16 orang anggota dewan. Pada periode 2014-2019 dari 100 orang anggota dewan. perempuan yang berhasil duduk di parlemen 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada periode ini menurunnya keterwakilan anggota legislatif perempuan.(dprd-sumutprov.go.id)

Berdasarkan pada hal-hal diatas maka penulis tertarik dan berminat meneliti tentang “**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan?
- 1.2.2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengetahui kinerja anggota perempuan di DPRD provinsi Sumatera Utara
- 1.3.2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya tentang Sistem Politik Indonesia, Politik Lokal, dan juga yang berkaitan dengan kinerja perempuan dalam lembaga legislatif daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada dan teori yang diperoleh selama peneliti mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

2. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran hasil kerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2014 sampai 2015 sebagai keterwakilan (*representation*) perempuan.

3. Bagi civitas akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan

permasalahan yang ada di dalamnya serta bahan acuan pada penelitian sejenis.

4. Bagi kaum perempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas harapan aspirasi kaum perempuan mengenai kinerja keterwakilan perempuan di parlemen dalam mengatasi isu-isu perempuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 URAIAN TEORI

2.1.1 Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Pasolong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Sedangkan menurut Wibowo dalam Pasolong (2010:176), kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Menurut Mahsun (2006:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi dan rencana suatu organisasi. Kinerja pada sektor publik meliputi kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Dimana untuk dapat mencapai tujuan organisasi diperlukan keseimbangan antara kinerja individu, kelompok dan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama

di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat pencapaian ataupun hasil kerja dalam merespon kepentingan perempuan provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya dalam Mahsun (2006:26) terdapat empat elemen pokok pengukuran kinerja, antara lain:

- a) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran
- b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja, Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.
- c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti

pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai sasaran atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

- d) Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan *rewardpunishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar pening

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja organisasi

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Wibowo (2001:300) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individu, meliputi : pengetahuan, keterampilan (skill) , kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader

- c. Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim
- d. Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Selain itu Mahmudi (2010:20), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

1. Faktor personal Yakni meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki semua individu.
2. Faktor kepemimpinan Yakni meliputi kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan.
3. Faktor tim Yakni meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap semua anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem Meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual Meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Tangkilisan (2007:180-181), kinerja organisasi dimasa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

1. Struktur organisasi, sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas.
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
3. Sumber daya manusia, berkaitan dengan kualitas karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.
4. Sistem informasi manajemen, berhubungan dengan pengelolaan database yang digunakan untuk mempertinggi kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Sedangkan menurut Tangkilisan (2007:181-182), kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh dua faktor yakni:

1. Faktor internal yang terdiri dari:
 - a. Tujuan organisasi, yakni apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
 - b. Struktur organisasi, sebagai hasil design antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - c. Sumber daya manusia, yakni kualitas dan pengelola anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - d. Budaya organisasi, yakni gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
2. Faktor eksternal yang terdiri dari:
 - a. Faktor politik, hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan

mempengaruhi ketenangan organisasi dalam berkarya secara maksimal.

- b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang besar.
- c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Menurut Mahmudi (2015:21-22), kinerja organisasi memang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kinerja individual atau kinerja tim saja, namun dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas dan kompleks, misalnya faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum yang didalamnya organisasi beroperasi. Selain faktor lingkungan eksternal, faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pilihan, dukungan teknologi, kultur organisasi dan proses organisasi. Sedangkan pasolong (2016:186) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi yaitu :

1. Kemampuan

Pada dasarnya kemampuan menurut Robins (pasolong 2016:186), adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (1) kemampuan

intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan. Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki bakat dan intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi.

2. Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robins dalam buku (pasolong 2016:187) adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor : (a) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. (b) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh orang lain, pegawai lebih berbahagia apabila dapat menerima dan membantu pegawai lain

3. Energi

Energi menurut Jordan E. Ayan (2016:187) adalah pemercik api yang menyalahkan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. Mihaly Csikszentmihalyi dari universitas Chicago dalam buku Pasolong (2016:188) telah melakukan riset tentang pentingnya energy sebagai unsur terpenting keberhasilan

intelektual dan kreatif. Lewatnya yang mendalam menunjukkan bahwa orang-orang menjadi sukses dalam melakukan tugas jika mampu mencapai suatu keadaan yang di sebutnya Flow, atau mengalir.

4. Teknologi menurut Gifson dkk dalam buku pasolong (2016:188) adalah tindakan sisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi Teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut. Selanjutnya menurut Danise M. Rousseau dalam pasolong (2016:188) bahwa teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan

5. Kompensasi

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai berfikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan tambahan diluar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir

6. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2006:81) mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus

menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriterianya.

7. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut George Strauss & Leonard Sayles dalam buku pasolong (2016:189) adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, tidak cukup bagi seseorang dengan hanya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi mereka ingin memastikan bahwa kebutuhan mereka harus terpenuhi di masa yang akan datang. Seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kerja tim, sistem, struktur organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi, dukungan teknologi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor situasional/ lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tergantung pada jenis, karakteristik dan tujuan pembentukan organisasi itu sendiri.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek penilaian. Menurut Soeprianto aspek-aspek yang perlu dinilai untuk level pimpinan atau manager dalam suatu organisasi ialah: Tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa atau inisiatif dan kepemimpinan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk dapat menilai kinerja tersebut. Sehingga ada indikator atau tolok ukur atau ukuran yang jelas dan tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik maka kinerja organisasi publik dikatakan berhasil ketika mampu mewujudkan misi dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Menurut Dwiyanto (pasolong 2006:50) mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Produktivitas bahwa produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga untuk mengukur efektivitas pelayanan. Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan Dalam pelayanan publik, kualitas layanan merupakan faktor penting. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi dilihat dari kualitas layanan yang

diberikan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, kepuasan masyarakat menjadi indikator kinerja birokrasi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah di pergunakan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

c. Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-programn pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari pendapat-pendapat diatas maka diambil kesimpulan bahwa tolok ukur dari kinerja organisasi publik ialah responsivitas dimana dalam hal ini sejauh mana tingkat kepekaan organisasi publik ini untuk mau mendengarkan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tingkat responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengangkat derajat kaum perempuan sehingga tercapainya kesetaraan gender yang hingga kininampak sekali ketimpangan anantara laki-laki dan perempuan. kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya menunjukkan kinerja yang buruk dan menunjukkan kegagalan organisasi.

d. **Responsibilitas**, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan di birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit. Menurut Pinto dalam Azheri (2012:89), responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lainnya yaitu tanggung jawab yang merupakan suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Menurut Levine dalam Sembiring (2012:99), responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas dapat dinilai dari hasil analisis dokumen dan laporan kegiatan organisasi yang mana penilaian tersebut dengan cara mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi tersebut dengan standar prosedur administrasi. Standar operasional prosedur merupakan dokumen yang memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi khususnya pemerintah. Prinsip-prinsip administrasi yang dimaksud ialah prinsip-prinsip yang didasari dari undang-undang atau kebijakan yang berlaku

e. **Akuntabilitas** maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritas kan kepentingan rakyat. Sehingga karena dalam penelitian ini studi kasus DPRD jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD salah satunya juga dinilai dari akuntabilitas sehingga untuk melihat seberapa

besar pelaksanaan kegiatan dan tugas dari fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan pihak eksekutif. Sehingga dalam akuntabilitas ini DPRD di uji dimana ia harus merancang dan menentukan arah tujuan aktifitas pemerintahan di Sumatera Utara khususnya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perempuan yang sampai saat ini masih banyak kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi serta anggota dewan yang terhormat dapat mempertanggung jawabkannya ke publik.

2.1.3. Kontruksi Sosial Perempuan Dalam Ranah Politik

Kontruksi sosial atas Realitas (*social constructionn of Reality*) yang didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan in terkasi dimna individu, menciptakan secara trus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Kontruksi sosial merupakan teori sosiologi kontenporer, di cetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman. Kontruksi tersebut telah membuat kaum perempuan seperti kelompok yang terpinggirkan, bahwa perempuan hanya pantas berada di ranah dosmetik dan tidak layak terjun ke ranah politik terutama bidang politik. Hal ini menyebabkan terkekangnya perempuan sehingga mereka tidak dapat berkembang dan berkiprah seluas-luasnya dalam ruang public. Kontruksi ini memandang ketidak mampuan perempuan bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang public dianggap tidak mampu. Hal ini mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan.

2.1.4. Legislatif

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Rousseau tentang Volonte Generalr atau General Will yang menyatakan bahwa “Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan”. Menurut Meriam Budiarjo, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Susunan ke anggotaan legislatif pada dasarnya menurut Meriam Budiarjo, adalah beraneka ragam yaitu ada yang jumlahnya mencapai 1300 anggota seperti DPR di Uni soviet “Rusia”, DPR di Indonesia berjumlah 560 orang dan ada yang kecil seperti DPR Pakistan yaitu sebanyak 150 anggota. Sistem penentuan anggota DPR beranekaragam sifatnya yaitu:

1. Turun temurun (sebagian majelis tinggi inggris)
2. Ditunjuk (senat kanada)
3. Dipilih, baik secara langsung baik pun secara tidak langsung

Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Kehadiran konsep ini di pelopori

oleh Negara-negara demokrasi yang menganut Ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. asumsi ini mendorong lahirnya system perwakilan dalam kehidupan rakyat suatu Negara yang perwujudannya dilakukan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Namun demikian system perwakilan ini secara umum dapat dibagi 2 yaitu :

1. Sistem perwakilan langsung, yaitu system pengangkatan wakil rakyat secara langsung melalui pemilu oleh rakyat perantara DPR/MPR.
2. Sistem perwakilan tidak langsung, yaitu system pemilihan wakil rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menentukan calon legislatif yang akan diwakili dan juga mengangkat anggota-anggota DPR/MPR melalui pengangkatan dari unsure atau golongan oleh pemerintah.

2.1.5. Politik Gender

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang di pengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati masih terjadi kesalahpahaman mengenai perhatian gender dalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan.

Prinsip dalam kesetaraan gender harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan.

Persoalan perempuan terkait erat dengan masalah kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2.1.6. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Pada UUD 1945 pasal 28 mengatakan pengakuan Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warganya baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak dalam kehidupan bangsa dan bernegara tanpa adanya batasan. Sehingga hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan tersebut. Hak-hak perpolitikan perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi PBB yang menjelaskan beberapa hal :

1. Perempuan berhak dalam memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama bagi laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang telah dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.
3. Perempuan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.

2.1.7. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Akumulasi dari sub-sub yang saling interpendensi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan kerjasama sehingga dapat mencapai hasil yang besar dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, tentu termasuk dengan sistem politik yang memiliki fungsi yang perlu dilaksanakan meskipun fungsi ini tidak memiliki pengaruh

secara langsung dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. politik merupakan Kegiatan warga Negara biasa di bagi dua : mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari defenisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik :

- 1 menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
- 2 Kegiatan politik warga Negara biasa atau orang perorangan sebagai warga Negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara)
- 3 Kegiatan terebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah
- 4 Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil
- 5 Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence)
- 6 Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih

pimpinan Negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

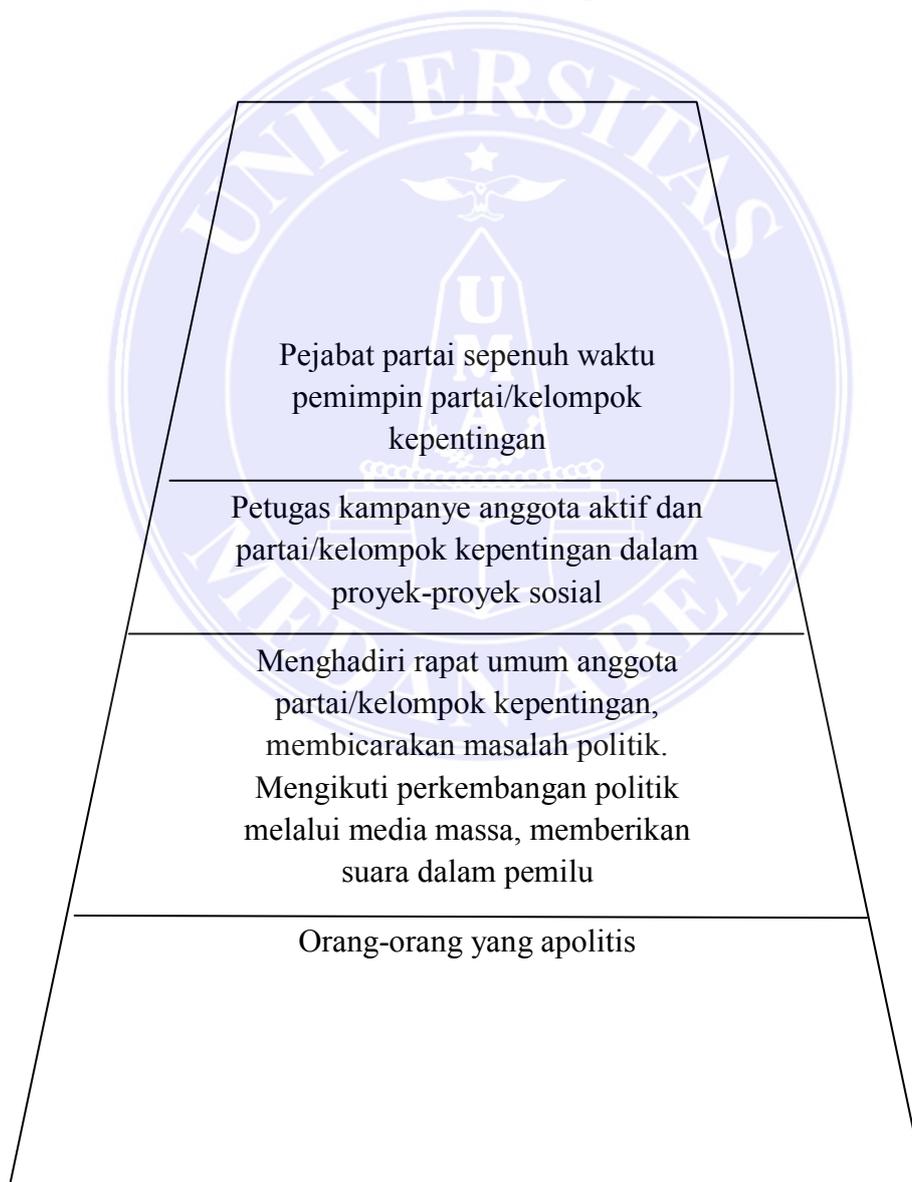
Menurut Myron Weine dalam Rahman (2007:286) terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintahan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk intensitas. Biasanya diadakan pengamatan

jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu besar sekali. Sebaliknya, kecil jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

Tabel 1.1 Piramida Partisipasi Politik



2.1.8. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.

Tabel 1.2 bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
partisipasi politik masyarakat,	Konfrontasi
artinya berbagai hal yang Kegiatan	Mogok
kampanye	Tindak kekerasan politik harta benda
Membentuk dan bergabung dalam	(perusakan, pemboman, pembakaran)
kelompok kepentingan komunikasi	Tindakan kekerasan politik terhadap
individual dengan pejabat politik dan	manusia (penculikan, pembunuhan)
administrative	Perang gerilya dan revolusi

2.1.9. Model partisipasi Politik

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka W.Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe

- 1) apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepadapemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif
- 2) Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
- 3) Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.
- 4) Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik. Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri (variable independent) artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi faktor lain seperti status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisir. Oleh karena itu hubungan dari faktor-faktor itu dapat di gambarkan sebagai berikut : status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman berorganisir merupakan variable pengaruh/independent. Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variable antara/intervening variables dan partisipasi politik merupakan terpengaruh (dependen).

2.1.10. Partisipasi Politik Perempuan

Perjuangan dalam menggolkan perempuan di parlemen bukan hanya memperjuangkan kuantitas saja tetapi, hal yang paling penting adalah kualitas perempuan. Bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaandan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan keadilan. Keikutsertaan perempuan dalam politik dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan politik yang sangat di perlukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut dalam pengfambialan kebijakan:

1. Perempuan adalah separuh penduduk dunia sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus di pertimbangkan. Dalam demokrasi pandangan kelompok-kelompok yang berbeda jenis harus diformulasikan dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan.
2. Partisipasi politik perempuan diharapkan dapat mencegah kondisi yang menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menghadapi masalah stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi dibidang hukum, kehidupan sosial dan kerja dan juga eksploitasi terhadap perempuan.
3. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan politik dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan maian.
4. Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget

meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan mempertimbangkan perpektif gender tersebut.

2.1.11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Suatu Negara yang Menyatakan demokratis harus mempunyai lembaga ini dalam struktur ketatanegaraanya karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlemen juga berfungsi sebagai fungsi pengaawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.12. Partai politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, M; 2008: 404). Partai politik adalah kekuatan politik (organisasi kekuatan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya, melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan negara,

apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi yang lain. Partai politik memegang peran penting untuk mengubah relasi gender ke arah kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan kesadaran gender (Soetjipto; 2005: 29-32). Makna parpol sebagai institusi politik dan pilar demokrasi direduksi hanya seperti perusahaan korporasi yang mengejar insentif ekonomi sebesar-besarnya, diperoleh lewat jabatan politik yang diperebutkan melalui arena pemilu dan pilkada. Ketua partai politik saat ini berperan lebih seperti *CEO* yang mengejar tujuan jangka pendek (pilkada, pemilu). Demi meraih tujuan politik tersebut proses politik dan institusionalisasi berjenjang tidak lagi berlaku, digantikan oleh peran lembaga survei. Makna seperti ini jauh dari pengertian organisasi kepartaian yang dibentuk dengan visi dan ideologi bersama, serta gagasan bahwa partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik ataupun agregasi kepentingan. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, vote getter yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, gizi, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa memotong jalur tanpa

mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada (Soetjipto; 2011: 4-6).

2.1.13. Peran Partai Politi Dalam Affirmative Action

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah pula diberi kepercayaan dalam affirmative action, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Munculnya affirmative action merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik, partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kaderkader pemimpin bangsa. Banyaknya partai politik yang muncul di era reformasi merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di sektor ini. Sebab adanya partisipasi perempuan dalam partai politik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan public atas hasil politik (Sastriyani; 2009: 174-176).

Perempuan dan politik merupakan rangkaian kata yang sering kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan

suaranya pada partai politik. Namun hal tersebut sepertinya hanya sebatas slogan, karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya

1.2. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tergantung pada jenis, karakteristik dan tujuan pembentukan organisasi itu sendiri. Hasil penelitian orang lain yang relevan dijadikan titik tolak penelitian kita. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang

1. Asti Latifah Tahun 2011 yang berjudul “Kinerja lembaga legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan Studi kasus DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja para lembaga legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di parlemen dalam mengupayakan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dar kegiatan aspirasi rakyat
2. A. Rizal Universitas Negeri Makasar yang berjudul “Kinerja anggota Legislatif Perempuan Studi Kasus DPRD Kota Makasar” penelitian ini bertujuan mengetahui upaya anggota legislatif DPRD Kota makasr dalam merespon aspirasi masyarakat

1.3. Kerangka pemikiran

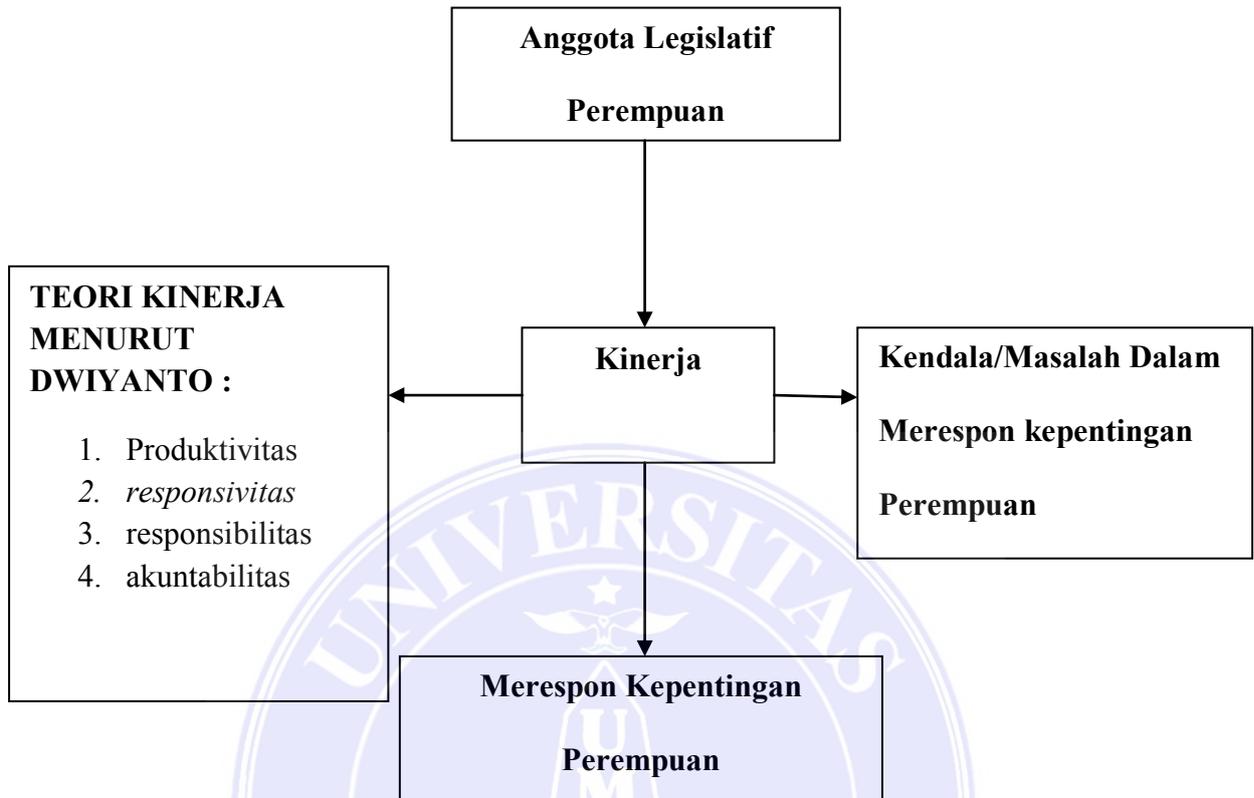
Uma sekaran dalam Sugiyono (2014::65) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri maka yang dilakukan peneliti yang disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variasi besaran variable yang diteliti (Sapo Haryoko, 1999 dalam buku Sugiyono).

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan salah satu hal yang patut diketahui dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan dapat diartikan sebagai “keterwakilan perempuan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam merespon kepentingan anggota legislatif perempuan di DPRD Sumut harus sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengaruskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan d tingkat pusat. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini jumlah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki, hal ini tidak lepas dari kendala pada situasi politik pada saat ini.

Tabel 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono (2017:6) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3.2. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Lokasi tempat penelitian adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di jalan Iman Bonjol No 5 Medan.

3.3. Waktu Penelitian

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agust 2019	Sept 2019
1	Penyusunan Proposal	■										
2	Seminar Proposal		■									
3	Perbaikan Proposal		■									
4	Pengambilan Data/Penelitian			■	■	■						
5	Penyusunan Skripsi					■	■	■				
6	Seminar Hasil							■				
7	Perbaikan Skripsi								■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau											■

3.4. Teknik pengumpulan data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan data skunder adapun yang dimaksud dengan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa wawancara dengan bagian terkait dengan pengumpulan data penelitian data dan data ini masih murni belum diolah dalam bentuk proses tertentu.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan di cata secara sistematis, serta dapat dapat dikontrol.

b. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interview, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu proses wawancara dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative, jawabannyapun sudah siap. Dengan struktur ini setiap informan diber pertanyaan yang sama dan pengumpulan data.

Menurut Yunus (2010) wawancara yang efektif maka dapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :

1. Mengenalkan diri
2. Menjelaskan maksud kedatangan
3. Menjelaskan materi wawancara
4. Mengajukan pertanyaan

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu anggota legislatif

laki-lakii, yaitu bapak fanotena waruwu dan Toni Togatorop
Fraksi Hanura

2. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara yaitu ibu Hj. Meilizar Latif, SE, MM, ibu Hj. Jamila.SH.MKn dan ibu Juarainda Gina

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti dan yang menjadi informan tambahan yaitu masyarakat provinsi Sumatera Utara yaitu ibu Manna nainggoalan dan Melati simanjuntak

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sistematis, yang sudah diolah dan dipublikasikan. Sumber data skunder dapat dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bukan meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data-data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan :

1. Studi pustaka (*Library Research*).

Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dari berbagai pendapat para ahli dengan cara mempelajari dan menganalisa teori-teori pendapat para ahli dengan cara mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara.

3.5. METODE ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Gay (2010:255), analisis data yang dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Sedangkan menurut sudjana (2010:255), analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi di lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan yang penuh makna.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan. “Kinerja Anggota Legislatif Perempuan DPRD Sumut dalam Merespon kepentingan Perempuan di Provinsi Sumatera Utara.”

5.1. Kesimpulan

Pada umumnya perempuan di Indonesia secara hukum memiliki kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah dalam kegiatan apapun, baik itu dalam pekerjaan dan mengutarakan pendapat. sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Tetapi karena alasan kultural yang mengembang di masyarakat hanya sedikit jumlah perempuan yang tampil di ranah politik sehingga dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara sangat lemah. Dalam upaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di kekuasaan legislatif dimana masyarakat masih mengutamakan profesionalisme laki-laki sehingga perempuan seakan hanya sebagai pelengkap.

1. Kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa dilihat pada periode ini dalam pencapaian kuliatas atau memperjuangkan hak-hak perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara kurang baik. Dimana kerjasama antara fraksi dan komisi dalam memenuhi kepentingan masyarakat khususnya perempuan tidak sejalan. Dalam hal ini fraksi dan Komisi

memberikan ruang dialog untuk berdiskusi tentang permasalahan yang ada dengan begitu aspirasi-aspirasi tersebut yang kemudian didiskusikan untuk membuat kebijakan kedepannya.

2. Faktor menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan adalah masalah anggaran dalam melaksanakan tugas masih kurang dimana dalam merespon aspirasi masyarakat seperti mengembangkan kreativitas kaum perempuan di daerah-daerah masih belum terealisasi akan tetapi aspirasi dari masyarakat di terima. Faktor lain penghambat kinerja legislatif perempuan yaitu budaya dimana pandangan masyarakat terhadap wanita yang masuk dalam ranah politik yang memiliki tanggung jawab yang banyak sehingga pandangan tersebut tidak terlalu banyak perempuan yang terlalu serius dalam berpolitik.

5.2. Saran

Berdasarkan hal-hal yang diatas adapun yang menjadi saran penulis yaitu dalam upaya meningkat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menampung aspirasi masyarakat harus dilanjutkan dengan di implementasi sehingga bukan hanya ditampung tetapi ada output dari lembaga ataupun dari anggota legislatif yang bertanggung jawab dalam kepentingan masyarakat terkhususnya dalam menampung atau memajukan kepentingan-kepentingan kaum perempuan di Sumatera Utara. Lebih di tingkatkan lagi keterwakilan perempuan di parlemen dengan begitu aspirasi masyarakat dapat di perjuangkan sehingga kedepannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta* : PT.Gramedia Pustaka Utama
- H.I Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia* Wahyudi Pramono, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mahsun, Muhamad. 2006. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Malang. BPFE-X.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP.STIM YKPN, Yogyakarta
- 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE-X
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabata, Bandung
- Sastriyani, Siti Hartini. 2009. *Gender and Politic*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana
- Soeptjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta Penerbit Buku Kompas
- 2011. *Politik Harapan: Perjalanan politik Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Usman.Husaini & Purnomo 2017. *Metododologi Penelitian Kesenjangan Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibowo, 2010. *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers : Jakarta
- 2011. *Manajemen kinerja Edisi Keempat*. Rajawali Pers : Jakarta

SKRIPSI

Asti Latifah. 2011. *Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.*

Undang-undang

Undang-undang politik. UU No.31 Tahun 2002 *Tentang Partai politik*

UU No.12 tahun 2003 *Tentang Pemilu*

UU No.39 Tahun 1999 Pasal 46

UUD 1945 pasal 28



LAMPIRAN



Gambar 1 : foto bersama kepada Bapak Fanotena Waruwu Fraksi Haura



Gambar 2 : Foto bersama kepada Bapak Toni Togatorop ketua Fraksi Hanura



Gambar 3 : Foto bersama Ibu Juarinda Gina Fraksi PAN



Gambar 4 : Foto bersama Ibu Hj Jamila Sh, MKn Fraksi Demokrat



Gambar 5 : foto bersama ibu Hj. Meilizar Latif SE. MM Fraksi Demokrat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

Email : Humas.dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 2011

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1014 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu :

Nama : Mikha Juni Adellina Mendrofa
NPM : 158510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 April 2019

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 45222 70
M E D A N

Email : Humas.dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Nomor : 431 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 18 Februari 2019

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik UMA
di-
M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area Nomor : 061/FIS.1/01.10/1/2019 tanggal 23 Januari 2019
Perihal Pengambilan Data / Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : Mikha Juni Adellina Mendrofa
N P M : 158510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov.
Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan
Perempuan di Provinsi Sumatera Utara*

Untuk Melaksanakan Pengambilan Data / Riset di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang
berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Hj. TINI
PENATA KK-I
NIP. 1964071219850092001





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N**

il : Humas.dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 18 Februari 2019

Nomor : 431 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik UMA
di-
M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area Nomor : 061/FIS.1/01.10/1/2019 tanggal 23 Januari 2019
Perihal Pengambilan Data / Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : Mikha Juni Adellina Mendrofa
N P M : 158510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov.
Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan
Perempuan di Provinsi Sumatera Utara*

Untuk Melaksanakan Pengambilan Data / Riset di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang
berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Hj. TINI
PENATA K. I
NIP. 196403121985090001

